

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN CAMAT ILE BURA TAHUN 2019



KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE BURA
LEWOTOBI

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Camat Ile Bura Tahun 2019, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Bupati merupakan salah satu kewajiban pemerintah kecamatan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Penyampaian LKPJ kepada Pemerintah secara substansial merupakan sebuah *progress report* yang menggambarkan kinerja pemerintah kecamatan secara utuh, selama satu tahun anggaran. LKPJ ini juga menggambarkan akuntabilitas capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian gambaran kinerja di dalam LKPJ ini merupakan implementasi dari penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Sejalan dengan itu, LKPJ secara substantif merupakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang dicapai selama satu tahun anggaran dengan berbagai keberhasilan dan tentunya masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi dan ditingkatkan pada tahun mendatang. Atas segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja pada Tahun 2019, akan dijadikan bahan evaluasi dalam penyempurnaan kinerja Pemerintah kecamatan di tahun mendatang. Segala saran, kritikan yang bersifat koreksi konstruktif sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah ke depan.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Ile Bura di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Lewotobi, Januari 2020

CAMAT ILE BURA,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	2
1. Kondisi Geografis Daerah.....	2
2. Gambaran Umum Demografis.....	3
3. Kondisi Ekonomi.....	5
4. Organisasi Kecamatan dan Sumber Daya Aparatur.....	8
BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	11
A. Visi	11
B. Misi.....	11
BAB III URUSAN KONKRUEK, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.....	11
1. OPD Pelaksanaan.....	11
2. Program dan Kegiatan.....	11
3. Tingkat Pencapaian SPM.....	12
4. Jumlah Pegawai.....	12
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	13
6. Proses Perencanaan Pembangunan.....	17
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.....	18
8. Permasalahan dan Solusi.....	18
BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAH.....	22
A. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah.....	22
1. Forum Koordinasi.....	22
2. Materi Koordinasi.....	22
3. Instansi Vertikal Yang Terlibat.....	23
4. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	23
5. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.....	23
6. Jumlah Pegawai.....	24
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan.....	24
8. Hasil dan Manfaat Koordinasi.....	24
9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi.....	25
B. Pembinaan Batas Wilayah.....	25
C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	25
D. Pengelolaan Kawasan Khusus.....	25
E. Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum.....	25
BAB V PENUTUP.....	26
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Ile Bura tentunya tidak terlepas dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sebagai dasar hukum pembentukan Kabupaten Flores Timur, dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem.66/1/32 Tahun 1963 tentang Kecamatan dalam Daerah Swatantra Tingkat II se-Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Ile Bura, Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Adonara

B. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. *Kondisi Geografis Daerah*

Kecamatan Ile Bura merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk pada tahun 2007, dengan topografi bergunung dan berbukit dengan kemiringan yang lebih dominan < 500 m DPL, dengan musim hujan \pm 3 bulan dan musim kemarau 9 bulan membawa kendala tersendiri. Selain itu, seiring dengan perubahan iklim global, pergantian musim menjadi tidak menentu dan anomali cuaca yang sulit diprediksi, membawa implikasi tersendiri terhadap berbagai kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ile Bura ini.

Luas wilayah Kecamatan Ile Bura adalah : 48,53 Km² dan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

U t a r a : Kecamatan Titehena – Kabupaten Flores Timur
 S e l a t a n : Selat Lewotobi
 T i m u r : Kecamatan Titehena – Kabupaten Flores Timur
 B a r a t : Kecamatan Wulanggitang- Kabupaten Flores Timur

Luas wilayah per desa dan tinggi rata-rata dari permukaan laut seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 1.1				
Luas Wilayah Per Desa dan Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut				
No.	Nama Desa	Luas Desa (Km ²)	Tinggi Rata-rata DPL (m)	Persentasi Terhadap Kecamatan
1	2	3	4	5
1.	Nobo	2,75	100	5,67
2.	Nurabelen	8,45	100	17,41
3.	Riang Rita	3,85	100	7,93
4.	Lewotobi	9,15	100	18,85
5.	Lewoawang	10,25	100	21,12
6.	Riangbaring	8,26	300	17,02
7.	Dulipali	5,82	1200	11,99
Jumlah		48,53		100,00

Sumber : Profil Kecamatan Ile Bura dalam Angka

Tabel 1.2						
Tanah yang Bersertifikat dan yang Belum Bersertifikat						
No.	Nama Desa	Luas (Ha)	Jumlah Bidang Tanah	Yang Bersertifikat	Yang Belum Bersertifikat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nobo					
2.	Nurabelen	1.139	1.757	1.757	0	desa lengkap sertifikat
3.	Riang Rita					
4.	Lewotobi	1.205	1.222	1.040	182	target lengkap sertifikat
5.	Lewoawang					
6.	Riangbaring	121	458	200	258	
7.	Dulipali					
Jumlah		2.465	3.437	2.997	440	
Sumber : Laporan dari desa.						

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dari ke-7 desa dalam wilayah Kecamatan Ile Bura yang telah menjadi desa/kelurahan lengkap sertifikat adalah Desa Nurabelen; dari 1.757 bidang tanah, telah dilakukan sertifikasi sebesar 1.757 bidang atau 100% sertifikat tanah, dan Desa Lewotobi dari 1.222 bidang tanah, yang telah bersertifikat mencapai 1.040 bidang atau 85,11%. Sedangkan desa Riangbaring dari 458 bidang tanah yang telah disertifikatkan sebanyak 200 bidang, sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak 258 bidang dan untuk 4 desa yang lain belum dilakukan pemetaan dan sertifikasi.

2. *Gambaran Umum Demografis*

Sebaran penduduk Kecamatan Ile Bura sampai 31 Desember 2019, tercatat mencapai 8.057 jiwa, dengan rincian sebagai berikut : Laki-laki sebanyak 4.050 jiwa atau 50,26% dan Perempuan sebanyak 4.007 jiwa atau 49,73%. Sedangkan desa dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada pada Desa Lewotobi sebanyak 1.680 jiwa atau 20,85%, disusul Desa Nobo sebanyak 1.583 jiwa atau 19,64% dan Desa Lewoawang sebanyak 1.448 jiwa atau 17,97%. Sedangkan sebaran penduduk terendah adalah Desa Riang Rita sebanyak 680 jiwa atau 8,43%, disusul Desa Dulipali sebanyak 815 jiwa atau 10,11%.

Tabel 1.3					
Jumlah Penduduk Kecamatan Ile Bura per Desa Tahun 2019					
No.	Nama Desa	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1.	Nobo	381	812	771	1.583
2.	Nurabelen	235	461	453	914
3.	Riang Rita	167	345	335	680
4.	Lewotobi	438	838	842	1.680
5.	Lewoawang	374	733	715	1.448
6.	Riangbaring	246	476	461	937
7.	Dulipali	206	385	430	815
Jumlah		2.047	4.050	4.007	8.057

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Flotim 2019

☞ Adapun luas menurut penggunaan Tanah :

- a. Luas Pekarangan & Bangunan : 78,25 Ha
- b. Luas tanah Bukan Lahan Sawah :
 - . Lahan Kering : 2.704,00 Ha
 - . Lainnya : 1.149,00 Ha
- c. Tegal/ Kebun/ladang : 1.806,00 Ha
- d. Padang Rumput : 400,00 Ha
- e. Perkebunan rakyat : 1.267,00 Ha
- f. Perkebunan Swasta : 260 Ha
- g. Perkebunan Negara : -
- h. Tanah kayu-kayuan : 5.400 Ha
- i. Tanah yang belum digunakan : 862 Ha
- j. Luas tanah tandus / kritis : 2.704 Ha
- k. Luas tanah hutan : 10.378 ha

☞ Topografi :

- a. Tanah perbukitan : 60 %.
- b. Tanah lembah : 40 %.
- c. Luas tanah hutan : 10.378 ha.

☞ Gunung Api.

Terkait Gunung Api aktif terdiri atas Gunung Lewotobi Laki – Laki dengan tinggi 1.470 m, dan Lewotobi Perempuan dengan tinggi 1.663 m. keadaan topografi tersebut menyebabkan sering terjadinya bencana alam berupa tanah longsor, banjir dan gempa bumi.

a. Mata Pencaharian.

Penduduk di Kecamatan Ile Bura 80 % bermata pencaharian bertani, mengelola kebun dan ladang. Di samping bertani ada pula yang berprofesi sebagai buruh, Tukang, PNS – Swasta, Guru dan Ojek.

3. *Kondisi Ekonomi*

❖ **Sektor Pertanian**

Kecamatan Ile Bura memiliki areal lahan pertanian seluas 1.849 Ha yang merupakan lahan kering atau 0,38% dan sisanya 13.644 Ha atau 99,62% merupakan lahan tidur dan hutan tutupan. Sehubungan dengan kondisi alam tersebut, pada tahun 2019, Kecamatan Ile Bura memproduksi komoditas tanaman pangan sebagai berikut : *Padi 2.100 ton, Jagung 33.570 ton* dan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4				
Luas Panen Tanaman Pangan di Kecamatan Ile Bura				
No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (kw/ha)	Produksi (Ton)
1	2	3	4	5
1.	Padi / <i>Paddy</i>	136	21	2.100
2.	Jagung / <i>Maize</i>	461	33,57	33.570
3.	Ubi Kayu / <i>Cassava</i>	-	-	-
4.	Ubi Jalar / <i>Sweet Potatoes</i>	-	-	-
5.	Kacang Tanah / <i>Peanuts</i>	-	-	-
6.	Kacang Hijau / <i>Green Peas</i>	-	-	-
7	Sorgum / <i>Shorgom</i>	-	-	-

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2017

❖ **Peternakan**

Sektor peternakan di Kecamatan Ile Bura pada umumnya dipandang sebagai usaha rumah tangga atau sampingan, karena masyarakat Ile Bura merupakan masyarakat agraris atau petani, sehingga ternak besar, kecil, dan unggas belum diusahakan secara maksimal. Hanya ternak babi dan kambing yang menonjol, karena kedua jenis ternak ini merupakan ternak untuk kebutuhan seremonial adat dan urusan adat lainnya. Jumlah masing-masing secara kecamatan rata-rata babi mencaapai 141 ekor dan kambing mencapai 117 ekor. Ayam mencapai 2.108 ekor dan sapi mencapai 15 ekor. Dalam beberapa tahun terakhir, populasi babi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Kecamatan Ile Bura karena adanya bantuan program dari

Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui misi “*Selamatkan Orang Muda Flores Timur.*”

Tabel 1.5		
Populasi Menurut Jenis Ternak		
No.	Jenis Ternak	Jumlah Populasi
1	2	3
1.	Sapi	15
2.	Kerbau	-
3.	Kuda	1
4.	Kambing	117
5.	Domba	-
6.	Babi	141
7.	Ayam Kampung	2.108
8.	Itik	-

Sumber : Data Sekunder BPP Lewotobi 2019

❖ Perkebunan

Luas areal dan produksi perkebunan menurut jenis komoditi memberikan gambaran bahwa komoditi perkebunan yang menonjol atau andalan di Kecamatan Ile Bura sepanjang tahun 2018 adalah *Jambu Mete* dengan produksi sebanyak 1.020,12 ton, *Kelapa* dengan produksi 438,69 ton, *Kemiri* dengan jumlah produksi 89,00 ton dan *Kakao* dengan produksi 74,45 ton, serta komoditi lainnya yang mendukung pertumbuhan perkapita masyarakat secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6		
Produksi Perkebunan Menurut Jenis Komoditi		
No.	Jenis Komoditi	Jumlah Produksi (ton)
1	2	3
1.	Kelapa	438,69
2.	Kopi	-
3.	Cengkeh	-
4.	Kakao / Coklat	74,45
5.	Jambu Mete	1.020,12
6.	Kemiri	89,00
7.	Pala	1,46
8.	Lada	-
9.	Vanili	2,33
10.	Kapuk	3,11
11.	Tembakau	-
12.	Jarak Pagar	0,47
13.	Pinang	13,24

Sumber : Kecamatan Ile Bura Dalam Angka 2017

❖ Perikanan

Wilayah perairan Kecamatan Ile Bura sangat berpotensi untuk dikembangkan dan mempunyai prospek yang baik bagi pasar dalam daerah maupun luar daerah. Ditinjau dari aspek geografis, Kecamatan Ile Bura memiliki garis pantai yang panjang dan jumlah desa pantai sebanyak 7 desa dengan jumlah Rumah Tangga usaha perikanan sebanyak 127 Rumah Tangga. Untuk memperoleh hasil tangkapan yang optimal harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Pada tabel berikut, dipaparkan jumlah perahu / kapal penangkap ikan serta alat tangkap yang digunakan :

Tabel 1.7		
Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan dan Jumlah Alat Tangkap Ikan		
No.	Jenis Kapal / Alat Tangkap	Jumlah
1	2	3
1.	Sampan / Jukung	59
2.	Perahu Papan	23
3.	Motor Tempel	23
4.	Kapal Motor < 5 GT dan > 5 GT	12
5.	Tanpa Perahu	-

Sumber : Kecamatan Ile Bura Dalam Angka 2017

Sedangkan luas lahan potensial untuk usaha budidaya perikanan laut \pm 1.240 Ha, terdapat pada beberapa perairan pesisir dan teluk yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya *mutiara*, *rumpun laut*, *ikan kerapu* dan

baronang, teripang serta kepiting. Dengan mencermati potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kecamatan Ile Bura, maka dapat diketahui hasil atau produksi laut sebagai berikut : *Lencana : 27 Kg, Kuwe : 21 Kg, dan Kerapu : 20 Kg dan Tembang : 15 Kg.* Produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel berikut :

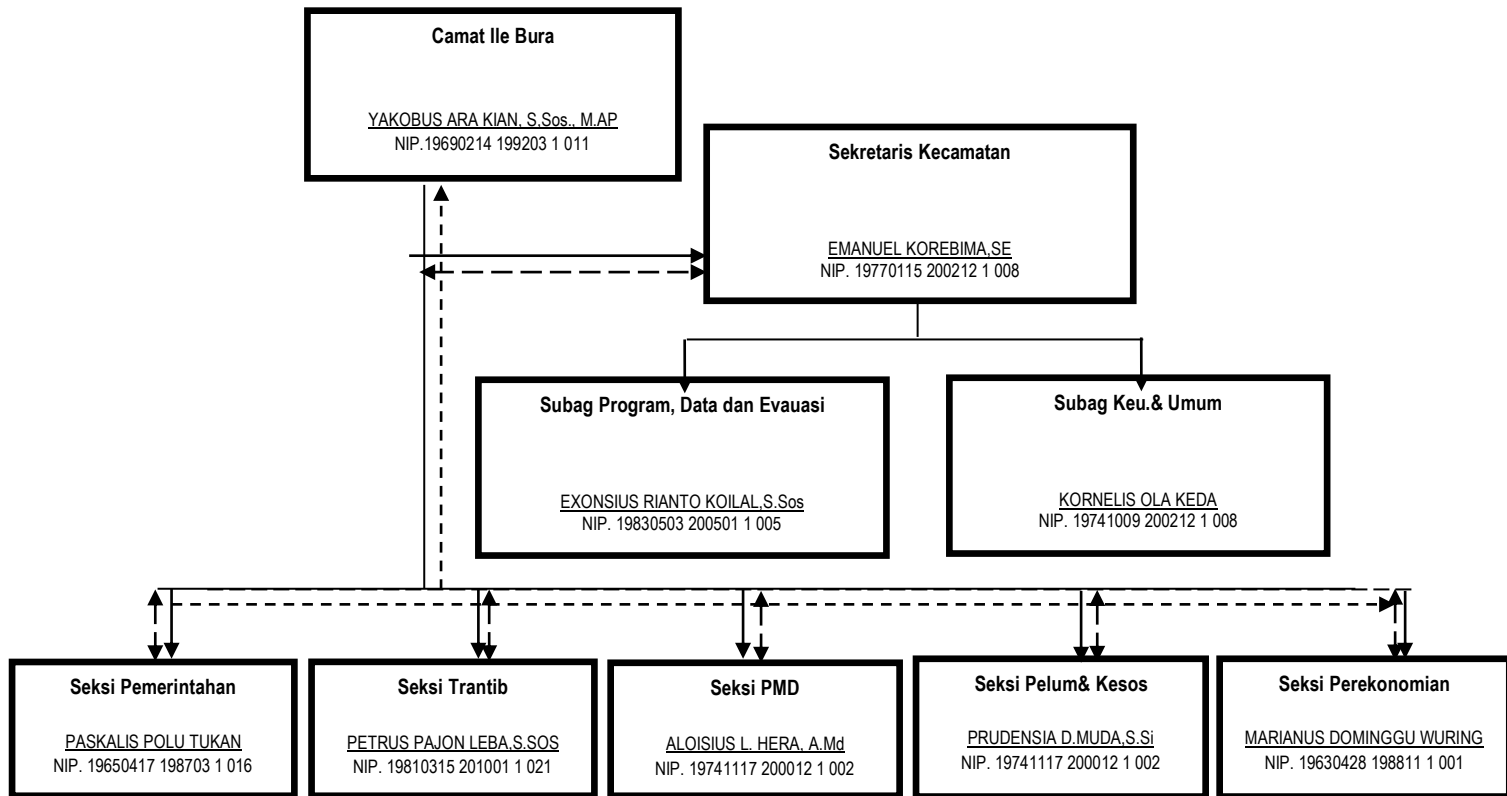
Tabel 1.8		
Hasil Produksi Perikanan Laut		
No.	Jenis Komoditas	Jumlah Produksi (ton)
1	2	3
1.	Kakap	7
2.	Kakatua	3
3.	Kerapu	20
4.	Kuwe	21
5.	Kuris	7
6.	Swanggi	5
7.	Selar	7
8.	Tembang	15
9.	Julung-julung	2
10.	Lencana	27
11.	Cendro	3
12.	Kembung	-
13.	Kome	-
14.	Biji Nangka	2
15.	Pari	-
16.	Tenggiri	1
17.	Layang	6
18.	Tuna / Cakalang	-
19	Tongkol	20

Sumber : Kecamatan Ile Bura Dalam Angka Tahun 2017

4. Organisasi Kecamatan dan Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016. Tata kelola pemerintahan Kecamatan Ile Bura dipimpin oleh seorang Camat dan dibantu seorang Sekretaris, 5 orang Kepala Seksi, 2 orang kepala sub bagian dan 4 staf pelaksana. Di samping itu pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Camat Ile Bura dibantu oleh 5 orang tenaga kontrak.

Adapun Struktur Organisasi Kantor Camat Ile Bura sesuai Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Sumber Daya Aparatur dalam Jabatan Struktural SKPD Kecamatan Ile Bura dapat dilihat dalam Tabel 2. Di bawah ini.

Tabel 1.9.

Jumlah PNS Kantor Camat Ile Bura berdasarkan Jabatan Tahun 2019

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Camat	III.a	1 orang
2.	Sekretaris Camat	III.b	1 orang
3.	Kepala Seksi	IV.a	5 orang
4. 8	Kasubag	IV.b	2 orang
JUMLAH			9 orang

Sumber :Bagian Kepeg. Kantor Camat Ile Bura Tahun 2019.

Tabel 1.10.

Keadaan PNS Menurut Pangkat Golongan / Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
2.	Pembina	IV/a	1 orang
3.	Penata Tingkat I	III/d	3 orang
4.	Penata	III/c	2 orang
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	1 orang
6.	Penata Muda	III/a	2 orang
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	-
8.	Pengatur	II/c	4 orang
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
10.	Pengatur Muda	II/a	-
11.	Juru Tingkat I	I/d	-
12.	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
13.	Juru Muda	I/a	-
JUMLAH			14 orang

Sumber : Bagian Kepeg. Kantor Camat Ile Bura Tahun 2019.

Tabel 1.11.

Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	1 orang
2.	Sarjana (S-1)	4 orang
3.	Diploma III/Akademi/Ahli Madya	1 orang
4.	Diploma I/Diploma II	0 orang
5.	SLTA	8 orang
6.	SLTP	0 orang
7.	SD	0 orang
JUMLAH		14 orang

Sumber : Bagian Kepeg. Kantor Camat Ile Bura Tahun 2019.

Tabel 1.12.

Keadaan PNS Menurut Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	0 orang
2.	PIM III / SPAMA	1 orang
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	2 orang
JUMLAH		3 orang

Sumber : Bagian Kepeg. Kantor Camat Ile Bura Tahun 2019.

Keadaan Tenaga Honorer Kecamatan Tahun 2019 berjumlah : 5 (Lima) orang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Visi (*Tidak ada*)B. Misi (*Tidak ada*)

BAB III

URUSAN KONKRUEN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. OPD Pelaksana

NO	NAMA SKPD	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	
		WAJIB	PILIHAN
1	Kantor Camat Ile Bura	1. Fungsi Penunjang Prioritas	-

2. Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional.
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
6. Penyediaan alat tulis kantor.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat

1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
2. Fasilitasi dan Koordinasi pelayanan kemasyarakatan

3. Pendampingan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

3. Tingkat Pencapaian SPM

Pencapaian kinerja belum diukur berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal sehingga didasarkan pada capaian program dan kegiatan (outcome) seperti tersebut diatas.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Ile Bura yang melaksanakan sebagian Urusan Wajib Fungsi Penunjang Prioritas berjumlah 14 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- 1) Magister : 1 orang
- 2) Sarjana : 4 orang
- 3) Diploma : 1 orang
- 4) SMA : 8 orang
- 5) SMP : - orang
- 6) SD : - orang

b. Berdasarkan Golongan

- 1) IV : 1 orang
- 2) III : 9 orang
- 3) II : 4 orang
- 4) I : - orang

c. Berdasarkan Jabatan

- 1) Pejabat Struktural : 9 orang
- 2) Fungsional : - orang

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat.

<i>Target</i>	:	Rp	2.340.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp	2.340.000				
<i>Prosentase</i>	:		100%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya meterai.					
<i>Outcome</i>	:	Terlaksananya urusan administrasi surat menyurat, optimalisasi koordinasi vertikal demi sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan.					

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

<i>Target</i>	:	Rp	18.468.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp	18.468.000				
<i>Prosentase</i>	:		100%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya pulsa, air bersih dan listrik/penerangan.					
<i>Outcome</i>	:	Terlaksananya koordinasi pemerintahan, terpenuhinya kebutuhan akan air bersih dan penerangan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.					

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional.

<i>Target</i>	:	Rp	1.000.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp	500.000				
<i>Prosentase</i>	:		50%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya dokumen perizinan untuk kendaraan dinas roda 2					
<i>Outcome</i>	:	Kenyamanan pelayanan bagi masyarakat dan kebutuhan koordinasi					

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan.

<i>Target</i>	:	Rp	17.455.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp	17.400.000				
<i>Prosentase</i>	:		99,68%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya honorarium bagi Satuan Perangkat Pemegang Kas					
<i>Outcome</i>	:	Terlaksananya pengelolaan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan.					

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

<i>Target</i>	:	Rp	3.780.425				
<i>Realisasi</i>	:	Rp	3.780.425				
<i>Prosentase</i>	:		100%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor.					
<i>Outcome</i>	:	Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif .					

6. Penyediaan alat tulis kantor.

<i>Target</i>	:	Rp	27.524.325				
<i>Realisasi</i>	:	Rp	27.524.000				
<i>Prosentase</i>	:		100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai.					
<i>Outcome</i>	:	Terselenggaranya urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang optimal.					

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

<i>Target</i>	:	Rp	12.193.500				
<i>Realisasi</i>	:	Rp	12.193.500				
<i>Prosentase</i>	:		100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya dana untuk penggandaan dan penjiilidan.					
<i>Outcome</i>	:	Tersedianya dokumen administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.					

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan.

<i>Target</i>	:	Rp	2.913.750				
<i>Realisasi</i>	:	Rp	2.913.750				
<i>Prosentase</i>	:		100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya instalasi listrik gedung kantor yang baik.					
<i>Outcome</i>	:	Terpenuhinya kebutuhan listrik kantor yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.					

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

<i>Target</i>	:	Rp 23.600.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 23.600.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya anggaran makanan dan minuman rapat dan tamu dinas.				
<i>Outcome</i>	:	Terciptanya sinergisitas sistem koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.				

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

<i>Target</i>	:	Rp 77.175.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 77.175.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya dana operasional pendukung.				
<i>Outcome</i>	:	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi vertikal dan horisontal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.				

11. Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran

<i>Target</i>	:	Rp 69.110.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 69.089.330				
<i>Prosentase</i>	:	99,97%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya dana untuk membiayai tenaga pendukung dan teknis perkantoran.				
<i>Outcome</i>	:	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.				

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

<i>Target</i>	: Rp 8.000.000				
<i>Realisasi</i>	: Rp 8.000.000				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	Tersedianya meubelair dan peralatan rumah tangga kantor.				
<i>Outcome</i>	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.				

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

<i>Target</i>	: Rp 34.800.000				
<i>Realisasi</i>	: Rp 34.800.000				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	Tersedianya sound system dan personal komputer serta printer kantor				
<i>Outcome</i>	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.				

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

<i>Target</i>	: Rp 4.027.000				
<i>Realisasi</i>	: Rp 4.027.000				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	Terpeliharanya bangunan gedung kantor.				
<i>Outcome</i>	Terciptanya situasi kerja yang kondusif bagi aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.				

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

<i>Target</i>	: Rp 16.730.000				
<i>Realisasi</i>	: Rp 16.730.000				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	Tersedianya biaya servis kendaraan dan BBM				
<i>Outcome</i>	Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas kantor dan operasional perkantoran.				

c. Program koordinasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat

1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

<i>Target</i>	: Rp 35.642.875				
<i>Realisasi</i>	: Rp 35.642.875				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	: Terlaksananya kegiatan MUSRENBANG RKPD Kab. di Kec.				
<i>Outcome</i>	: Tersedianya dokumen usulan perencanaan pembangunan				
	Tingkat Kecamatan.				

2. Fasilitasi dan Koordinasi pelayanan kemasyarakatan

<i>Target</i>	: Rp 23.000.000				
<i>Realisasi</i>	: Rp 23.000.000				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	: Tersedianya honorarium bagi FORKOPINCAM.				
<i>Outcome</i>	: Terlaksananya koordinasi untuk menjamin kamtibmas				
	Tingkat Kecamatan.				

3. Pendampingan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

<i>Target</i>	: Rp 23.640.000				
<i>Realisasi</i>	: Rp 23.640.000				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	: Tersedianya dana monitoring Pengelolaan Keuangan desa				
<i>Outcome</i>	: Terwujudnya tertib pengelolaan keuangan oleh desa				

7. Proses Perencanaan Pembangunan

Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan dimulai pada Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Proses perencanaan di tingkat Dusun lebih bersifat penggalan gagasan dalam artian mengumpulkan data/informasi dan menampung berbagai usulan masyarakat pada masing-masing dusun untuk diteruskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Proses, mekanisme dan sistem perencanaan pembangunan yang dijalankan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan dasar ini maka, prinsip-prinsip proses perencanaan perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh agar dapat mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat. Prinsip-prinsip yang dikedepankan adalah Pemberdayaan, Partisipatif, keberpihakan kepada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisien, efektif dan keberlanjutan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud di atas, proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Ile Bura adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahun Ketiga, yaitu Tahun 2019 yang meliputi Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Ile Bura untuk tahun 2017 s/d 2022. Rencana Kerja tahunan disusun oleh masing-masing Seksi dan sekretariat untuk dijadikan Pedoman Rencana Kerja Tahunan Kantor Camat Ile Bura.
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahun berikutnya dengan proses sebagai berikut :
 - a. Menjabarkan kegiatan tahun ketiga dalam RPJM Kecamatan.
 - b. Melakukan kajian terhadap masalah dan potensi yang ada untuk diajukan dengan mempertimbangkan aspek kemendesakkan.
 - c. Penyusunan potensi usulan sesuai urusan/kewenangan yang diberikan untuk mendapat pertimbangan dan dukungan dana dari Bupati Flores Timur.
3. Perencanaan pembangunan kecamatan dilaksanakan dengan berpedoman pada usulan kebutuhan masyarakat desa. Hal yang terpenting dalam penentuan prioritas usulan masyarakat adalah manfaat usulan yang berbasis kawasan. Prioritas kebutuhan masyarakat dari masing-masing desa diperjuangkan lagi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur di Kecamatan.

8. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Sarana dan prasarana pendukung pelayanan tugas dan fungsi Kecamatan Ile Bura yang tersedia memadai sangat membantu aktivitas pelayanan yang cepat, tepat dan memadai. Secara umum, kondisi sarana prasarana kantor tidak atau kurang memadai karena kondisi bangunan gedung yang kecil dengan ketersediaan ruangan kerja aparatur yang tidak memberikan kenyamanan dalam bekerja (*ruangan kerja sangat kecil dan ditempati oleh lebih dari 3 orang aparatur*). Kondisi sarana dan prasarana pendukung berupa : tanah, gedung kantor dan sarana penunjang lainnya dapat dirinci sebagaimana terlihat dalam lampiran.

9. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Camat Ile Bura masih terdapat permasalahan/issu yang dihadapi, yang dapat diinventarisir sebagai berikut :

1. **PERMASALAHAN INTERNAL PEMERINTAH**

• Masalah

- ☞ Aparatur belum sepenuhnya memahami uraian tugas yang diimplementasikan dalam uraian-uraian kegiatan untuk memudahkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Kantor Camat.
- ☞ Sistem pengarsipan dokumen yang belum memenuhi standard pengarsipan yang sesungguhnya. Banyak dokumen masih diarsipkan secara manual oleh masing-masing seksi.
- ☞ Masing-masing seksi belum secara maksimal membentuk Standard Operasional Prosedural yang sistematis untuk dijadikan pedoman pelayanan di Kantor Camat Ile Bura. Hal ini terjadi karena aparatur belum mendapat petunjuk dan bimbingan teknis terkait penyusunan SOP secara berkala/memadai.
- ☞ Minimnya ketersediaan fasilitas sarana prasarana kerja pendukung operasional perkantoran, berupa :
 - Kendaraan roda dua (sepeda motor)
 - Perangkat lunak (laptop)
 - Akses sinyal selular dan internet yang sangat lemah
 - Belum tersedianya bangunan ruang rapat umum / aula.
- ☞ Kekurangan tenaga teknis pendukung administrasi perkantoran.

• Solusi/Jalan Keluar.

- ☞ Kecamatan diperlakukan sebagai OPD sebagaimana pada lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
- ☞ Alokasi anggaran untuk Kecamatan Ile Bura dapat dinaikan dengan pertimbangan tersendiri, karena Kecamatan dengan kondisi topografi yang berbukitan sehingga dukungan fasilitas jalan belum memadai yang akan mempengaruhi volume kunjungan masyarakat yang membutuhkan pelayanan termasuk pelayanan kepada masyarakat di 7 desa.

- ☞ Setiap Kepala Seksi diwajibkan membuat Rencana Kerja dan masing-masing staf membuat uraian kegiatan untuk mengukur beban kerja yang dilaksanakan oleh masing-masing pegawai/aparatur.
- ☞ Mewajibkan semua Kepala Seksi untuk membenah sistem pengarsipan, tata kelola administrasi seksi dan pembentukan SOP sesuai tugas pokok dan fungsi pada masing-masing seksi.
- ☞ Untuk mengatasi kekurangan tenaga teknis administrasi perkantoran maka diangkat tenaga honorer dan diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh tenaga organis / PNS. Namun demikian, kondisi ini sangatlah riskan karena tanggungjawab sebagai tenaga honorer sangatlah lemah dan kurang.

2. PERMASALAHAN EKSTERNAL PEMERINTAH

1. Masalah Hutan Adat Lewo di Desa Riangbaring

- Masalah

- ❖ Tahun 2013, Bartolomeus Baba Leba, dkk melakukan kegiatan penebangan pohon dan pembersihan lokasi mengakibatkan kerusakan hutan. Dengan Alasan : Lokasi yang dibuka merupakan lokasi kampung lama.

- ❖ Sudah dilakukan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Desa pada Tahun 2013.

Berita Acara Hasil kesepakatan : Tidak boleh melakukan kegiatan lanjutan pada lokasi Hutan Adat Lewo, Lokasi yang sudah rusak dibiarkan untuk menjadi hutan kembali, akan dilakukan Seremoni Adat untuk pemulihan kembali Hutan Adat yang telah rusak

- ❖ Tanggal 26 Pebruari 2019, laporan dari Tuan Tanah Suku Leba Patilian dan Penguasa Hutan Adat (Suku Kwuta) tentang aktifitas di lokasi hutan adat (pengembalaan ternak kambing dan pembersihan).

- Langkah Penyelesaian

- ❖ Tanggal 27 Pebruari 2019, Camat Ile Bura dan Kapospol Ile Bura, Pemerintah Desa, Tuan Tanah Suku Leba Patilian, Penguasa

Hutan Adat (Suku Kwuta) bersepakat agar segera dilakukan peninjauan lokasi.

- ❖ Tanggal 28 Pebruari 2019, Kasi Trantib Umum, Kapospol Ile Bura, Pemerintah Desa dan Tuan Tanah melakukan peninjauan lokasi.

Hasil Tinjauan : lokasi yang dibersihkan berukuran 21 x 26m dan terdapat beberapa pohon pisang yang baru ditanam.

- ❖ Tanggal 05 Maret 2019, Camat Ile Bura, Kapospol Ile Bura, Kasi Trantib melakukan fasilitasi penyelesaian Hutan Adat Lewo.

Berita Acara Hasil kesepakatan :

1. Menginventarisir semua Hutan Adat yang ada di dalam Wilayah Desa Riangbaring.
2. Melakukan penetapan batas Hutan Adat dan ditutup.
3. Tidak diperkenankan siapapun dan dengan alasan apapun menebang, memungut hasil, memotong pohon pisang dan bambu di dalam Hutan Adat Lewo.
4. Pohon pisang, bambu, kemiri, mente, kakao, kopi, Pohon komoditi lainnya dan pohon buah - buahan yang ada di dalam lokasi Hutan Adat Lewo dijadikan pohon hutan.
5. Tidak boleh melakukan penanaman pohon pisang, kemiri, mente, kakao, kopi, pohon komoditi lainnya dan pohon buah-buahan di dalam lokasi Hutan Adat Lewo dan Hutan Adat lainnya.
6. Tidak boleh mengikat atau menggembalakan hewan ternak di dalam lokasi Hutan Adat Lewo dan Hutan Adat lainnya.
7. Kegiatan yang berkaitan dengan Seremonial Adat pada lokasi Hutan Adat agar terlebih dahulunya disampaikan kepada Tuan Tanah, Penguasa Hutan Adat, Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BPD untuk diketahui.
8. Penghijauan kembali Hutan Adat yang rusak dapat dilakukan atas kesepakatan bersama.
9. Membangun kembali Rumah Adat pada tempatnya semula.

10. Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Adat agar segera melakukan rapat bersama dengan masyarakat untuk menyampaikan hasil kesepakatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hutan Adat Lewo dan membahas tentang Sangsi Adat dan Sangsi Pemerintah terhadap pelanggaran Hutan Adat yang ada di Wilayah Desa Riangbaring.
 11. Sangsi Adat ditetapkan oleh Lembaga Adat dan Sangsi Pemerintah akan ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
 12. Apabila terdapat pelanggaran pada lokasi Hutan Adat maka akan dikenakan Sangsi Adat dan Sangsi Pemerintah.
-
2. Masalah Tanah Suku Leba Demonlapan di Lokasi SDK Riangbaring
 1. Penyelesaian di Tingkat Desa pada Bulan Desember 2019 yang difasilitasi oleh Camat Ile Bura bersama Pemerintah Desa Riangbaring.
 2. Berita Acara penyelesaian :

Tanah Suku Leba diserahkan secara keseluruhan kepada Pemerintah Desa dengan catatan bahwa sebagian diserahkan ke SDK Riangbaring dan sebagian menjadi milik Desa.

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAH

A. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Hal – hal yang juga perlu diperhatikan dan menjadi substansi dasar dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah di Kecamatan Ile Bura adalah membangun koordinasi dengan Instansi Vertikal dalam mendukung berbagai program/kegiatan yang turun ke desa dari pemerintah, pemerintah propinsi maupun sector-sektor pesemakmuran pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Koordinasi sebagaimana dimaksud adalah :

1. Forum Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan bersifat langsung dan terarah kepada Badan/Kantor/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam kaitan dengan penyebaran program/kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Ile Bura. Di Kecamatan di kenal dengan Forum Koordinasi Musyawarah Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM), yang mana secara teknis dilakukan oleh Camat, Kapospol dan Babinsa Ile Bura serta dibantu oleh Sekretariat FORKOPIMCAM yang anggotanya terdiri dari para Kepala-kepala Seksi dan Kepala UPTD se Kecamatan Ile Bura.

2. Materi Koordinasi

- Penyelesaian Konflik wilayah perbatasan antar desa dalam wilayah kecamatan maupun antar kecamatan.
- Penebangan/pengrusakan hutan
- pemboman liar di wilayah perairan sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Ile Bura
- Penertiban SITU-SIUP
- Penyelenggaraan pemerintahan desa
- Masalah kesehatan masyarakat
- Peredaran/penjualan obat dan makanan
- Keuangan dan perpajakan
- Pemantauan pengelolaan dana Gerbang Emas
- Pemantauan pengelolaan dana Anggur Merah

3. Instansi Vertikal Yang Terlibat

- DP4D, DPMD, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Bagian Pemerintahan Umum, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM
- Badan Pertanahan Nasional
- Kapolres Flores Timur
- KODIM Larantuka

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Biaya yang digunakan untuk melaksanakan koordinasi ini bersumber pada APBD Kabupaten Flores Timur dalam DPA Kantor Camat Ile Bura dengan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi pelayanan Kemasyarakatan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Yang menyelenggarakan koordinasi adalah Kantor Camat Ile Bura dengan dinas, badan, kantor, bagian dan instansi lainnya sehubungan dengan masalah-masalah aktual yang timbul dan atau koordinasi program dan kegiatan yang bermuara pada masyarakat pedesaan yang berada di wilayah kecamatan. Terkait dengan hal ini, maka etika koordinasi selalu bersifat terpusat dan langsung pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Flores Timur. Hal ini didasarkan pada posisi kecamatan sebagai lembaga/instansi yang menjalankan kewenangan yang diberikan bupati.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

(lihat kondisi aparatur Kantor Camat Ile Bura pada Bab I)

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan

- a. Koordinasi dengan Kapospol dan Babinsa terkait kejadian pembakaran hutan lereng Gunung Lewotobi
- b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu dengan melakukan monitoring, pendampingan dan mengawal pelaksanaan Pilkades Serentak pada 4 desa, yakni Desa Nobo, Desa Nurabelen, Desa Birawan dan Desa Riangbaring.
- c. Melakukan koordinasi penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu : ADD, BPD, Perangkat Desa, Keuangan Desa, Administrasi Desa.
- d. Koordinasi pelaksanaan KIA, penyuluhan kesehatan masyarakat dengan dinas kesehatan
- e. Koordinasi terkait pengamanan peredaran/penjualan obat dan makanan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Konsultasi terkait keuangan dan perpajakan dengan Badan Keuangan Daerah
- g. Koordinasi pelaksanaan program Gerbang Emas dan Anggur Merah dengan DP4D dan DPMD
- h. Koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan DP4D

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

- a. Terciptanya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban yang menjamin keberlangsungan proses pelaksanaan pembangunan di desa-desa dari program/kegiatan SKPD dan atau hasil prakarsa masyarakat.

- b. Terbangunnya kesamaan persepsi dalam menterjemahkan program/kegiatan pembangunan terkait peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengimplementasikan program/kegiatan pemerintah bagi masyarakat di desa.
- c. Semua elemen pembangunan dan unsure terkait dalam tanggungjawabnya sebagai subyek pelaksana pembangunan, mengetahui tugas dan tanggungjawabnya dalam kerangka pembangunan sesuai visi – misi Kabupaten Flores Timur.

9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Mengamankan semua keputusan atau kesepakatan bersama terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kecamatan dalam kerangka pembangunan regional yang partisipatif dan berkesinambungan.

B. Pembinaan Batas Wilayah

(Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak ada).

C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

(tidak ada bencana yang terjadi)

D. Pengelolaan Kawasan Khusus

(tidak ada pengelolaan kawasan khusus)

E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, Anarkhis, Sapatisme atau lainnya)
 - Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa Nurabelen

No.	Bulan	Jenis Gangguan	Penyelesaian
-----	-------	----------------	--------------

1.	Oktober	Kenakalan Remaja terkait Pengerusakan fasilitas umum (pengerusakan DPT Pemilihan Kepala Desa Periode 2019 – 2025)	Penyelesaian di Tingkat Desa dan pembinaan kepada pelaku oleh Babinsa Ile Bura. Kedua pelaku membuat pernyataan tertulis agar tindakan tersebut tidak terulang lagi.
----	---------	---	---

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Ile Bura Tahun 2019, yang kami sampaikan selaku aparatur pemerintah yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Kecamatan Ile Bura. Atas petunjuk dan arahan Bapak Bupati dalam meningkatkan tugas-tugas pelayanan kami wilayah, terdahulunya disampaikan terima kasih.

Lewotobi, Januari 2020

KAMAT ILE BURA,

